

Orang yang meneliti dalil-dalil yang diungkapkan para ulama akan menemukan bahwa hukum pernikahan itu berbeda-beda dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, mungkin saja wajib, sunnah, atau makruh, karena seorang mungkin saja berada dalam salah satu dari tiga kondisi berikut ini:

Pertama: orang yang khawatir terjatuh dalam pada perzinahan jika ia tidak menikah, maka baginya pernikahan adalah wajib menurut pendapat ulama pada umumnya, karena menjaga kesucian diri dari perbuatan zina adalah wajib dan caranya dengan menikah.

Kedua: seseorang yang disunnahkan menikah, apabila memiliki gairah seksual namun ia yakin tidak akan terjatuh kepada zina, karena menikah lebih baik baginya dari pada tidak meskipun pilihan tidak menikah untuk alasan beribadah. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi, dan pendapat yang tampak dari ucapan serta perbuatan sahabat Rasulullah saw.

Ketiga: orang yang impoten atau tidak memiliki gairah seksual lagi karena berusia lanjut, sakit, atau karena sebab lain. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama:

- a. Menikah baginya adalah sunnah
- b. Pendapat kedua mengatakan lebih baik tidak menikah, karena manfaat pernikahan tidak dapat ia rasakan disamping hak seksual istrinya tidak dapat ia penuhi, sehingga membuat istri menderita dan ia sendiri telah mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak sanggup ia tunaikan. Lebih

- 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama meskipun yahudi atau nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Islam
 - 4) Dewasa
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai wanita
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kata-kata nikah atau *tazwīj*

- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji atau umrah
- 6) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4(empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Berbeda dengan perspektif fikih, undang-undang perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun. Tampaknya undang-undang perkawinan (UUP) hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ini cukup diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d. dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut diatas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah perkawinan atau

permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut diatas.

- e. Ketentuan tersebut berlaku hukum sepanjang masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pasal 7 terdapat persyaratan lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita yang mensyaratkan adanya batas minimal umur calon mempelai. Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomer 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti yang diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi hukum Islam (KHI) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan undang-undang perkawinan. Bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai dibawah umur sering mengakibatkan terjadinya perceraian sebagai akibat ketidak matangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Kalaupun ada penyimpangan pasal 7 dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Ternyata undang-undang

syarat mendapat dispensasi dari pengadilan agama, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat (2).⁴³

Dalam pasal 29 KUH perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu juga pemuda yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat perkawinan. Jika terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH perdata dan UUP no.1 1974. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUP No.1 tahun 1974 dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan agar pemuda pemudi yang melangsungkan perkawinan nantinya telah masak jiwa dan raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam hal ini bisa dikatakan adalah kedua calon sudah dewasa.

Dadang Hawari menulis, usia untuk berumah tangga dan KB menurut kesehatan adalah 20-15 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki dengan tiga alasan. Pertama, bahwa benar anak aqil balig ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, tetapi bukan berarti siap kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk reproduksi (hamil dan melahirkan). Kedua, dari tinjauan psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan, dan kondisi kejiwaannya masih labil dan karenanya belum siap benar menjadi istri apalagi orang tua. Ketiga, dari sisi

⁴³ Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dalam penentuan usia minimal KHI memang mengikuti Undang-Undang No.1 tahun 1974, namun KHI juga menyebutkan bahwa calon mempelai harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya jika masih berusia di bawah 21 tahun, ini menunjukkan bahwa usia dibawah 21 tahun masih berada dibawah penguasaan orang tua karena belum dianggap dewasa, belum mampu berdikari dan masih bergantung pada orang tuanya.

Undang-undang nomer 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia menolak mengadili seseorang yang usianya masih dibawah 18 tahun.⁴⁷

⁴⁷ Undang-undang nomer 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 6 berbunyi: pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18(delapan belas)tahun pada saat kejahatan dilakukan.